AKAD-AKAD PROGRESIF UNTUK KEUANGAN ISLAM YANG BERKELANJUTAN

Firman Natzir¹, Supriadi Hamid², Kamaruddin Arsyad³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: firmannazir900@gmail.com¹, supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id²,
dr.kamaruddin46@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pentingnya akad progresif dalam mendorong keuangan Islam berkelanjutan. Latar belakangnya adalah peran sentral akad (perjanjian) dalam setiap transaksi ekonomi syariah, yang menjadi landasan bagi hak dan kewajiban. Dengan pesatnya perkembangan keuangan syariah berdasarkan prinsip etis seperti larangan riba dan gharar, keberlanjutannya sangat bergantung pada penerapan akad yang sesuai syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi akad syariah untuk mendukung ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Menggunakan metode studi literatur deskriptif-analitis, penelitian ini mengulas konsep akad dan rukunnya, serta mengidentifikasi akad progresif (seperti modifikasi mudharabah dan musyarakah) yang relevan untuk transaksi nirlaba (tabarru') maupun berorientasi laba (tijarah). Diharapkan, penerapan akad progresif dapat menghasilkan sistem keuangan yang stabil dan bermanfaat jangka panjang bagi umat.

Kata Kunci: Akad Progresif, Keuangan Islam, Keberlanjutan.

Abstract

This study examines the significance of progressive contracts (akad) in fostering sustainable Islamic finance. The background highlights the central role of contracts in all Islamic economic transactions, forming the basis for rights and obligations. With the rapid development of Sharia finance, underpinned by ethical principles like the prohibition of usury (riba) and ambiguity (gharar), its sustainability heavily relies on Sharia-compliant contract implementation. Thus, this research aims to analyze innovative Sharia contracts to support a just, inclusive, and environmentally conscious Islamic economy. Employing a descriptive-analytical literature review, this study examines the concept of contracts and their pillars, identifying progressive contracts (such as modified mudharabah and musyarakah) relevant for both non-profit (tabarru') and for-profit (tijarah) transactions. It is expected that applying progressive contracts can lead to a stable financial system with long-term benefits for the community.

Keywords: Progressive Contracts, Islamic Finance, Sustainability.

A. Pendahuluan

Setiap hubungan antarmanusia tidak terlepas dari transaksi, atau yang dalam bahasa Arab disebut *mu'amalah*. Transaksi ini, ketika disepakati melalui akad (perjanjian), akan menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Akad tersebut bisa berupa perjanjian finansial (*māliyah*) atau non-finansial (*ghair māliyah*), dan berfungsi sebagai dasar untuk mengatur kelanjutan hubungan serta kesepakatan yang telah dibuat.¹

Pentingnya akad dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam memajukan ekonomi islam tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab ia merupakan landasan bagi berbagai kegiatan manusia. Pernikahan, misalnya, terjadi melalui akad yang mempersatukan sepasang individu sebagai suami istri. Bahkan lebih jauh lagi, semua hubungan antarmanusia, baik perorangan maupun kolektif, selalu membutuhkan akad untuk memfasilitasi setiap aktivitas yang mereka lakukan.²

Kuangan syariah telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, didukung oleh beragam instrumen dan lembaga. Perkembangan ini tidak hanya didorong oleh dukungan pemerintah, tetapi juga oleh prinsip-prinsip etis yang menjadi fondasinya, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), serta adil dan transparansi. Prinsip-prinsip ini membuat keuangan syariah dianggap lebih etis.³

Di Indonesia, untuk mendorong keuangan syariah yang berkelanjutan, perbankan syariah telah didirikan dengan pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, instrumen seperti *sukuk*, zakat, dan wakaf juga merupakan prinsip ekonomi Islam yang mendukung kemajuan keuangan syariah. Keberlanjutan keuangan syariah pada akhirnya bergantung pada lembaga pengelolanya: jika transaksi atau akad yang digunakan benar-benar menerapkan prinsip syariah, maka keuangan syariah yang berkelanjutan dapat terwujud.

Dengan demikian, penulisan tertarik untuk membahas tentang akad-akad progresif untuk keuangan islam berkelanjutan. Karena menurut penulis keuangan islam yang berkelanjutan dapat berdampak bagi kesejahteraan ummat, maka itu akad-akad yang dijalankan haruslah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode studi literatur untuk mendalami peran akad-akad progresif dalam mendorong ekonomi Islam berkelanjutan. Fokus utama adalah mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana inovasi dalam akad syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berwawasan lingkungan, khususnya di konteks yang relevan dengan perkembangannya.

¹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4, No. 12* (Desember 2019), hlm. 137

² Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Tahkim Vol. X No. 1*, (Juni 2014), hlm. 49.

³ Ely W. Hastuti, dkk, *Kuangan Islam dan Ekonomi Berkelanjutan*, Az-Zahra Media Society 2025, hlm. 5.

Pendekatan yang diadopsi adalah deskriptif-analitis melalui penelusuran pustaka. Kami akan mengumpulkan, mengulas, dan menganalisis secara komprehensif berbagai sumber literatur yang relevan. Ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep akad progresif dan potensinya dalam mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi Islam berkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan

Akad didefinisikan sebagai tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, di mana terjadi pertemuan antara ijab (pernyataan kehendak dari satu pihak) dan kabul (pernyataan kehendak dari pihak lain). Dalam konteks ini, akad memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak untuk dianggap sah secara hukum. Berbeda dengan akad, tindakan hukum yang hanya melibatkan satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, tidak dikategorikan sebagai akad. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang unilateral, yaitu tidak memerlukan persetujuan atau penerimaan dari pihak kedua (kabul) untuk pelaksanaannya.⁴ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”⁵

Ayat ini menggunakan lafadz amr yang berarti perintah untuk memenuhi janji (akad). Baik itu penjanjian antara makhluk dengan tuhannya maupun perjanjian antara makhluk dengan makhluk

Dalam kaedah *ushuliyah* lafadz amr merupakan lafadz yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakannya, apalagi perintah ini langsung dari Allah Swt kepada hambanya maka dari itu apabila kedua orang telah berakad maka hendaklah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Q.S. Al-Isra Ayat 34, Allah Swt berfirman

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

”Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang di maksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

Akad-akad progresif adalah instrument syariah yang didesain untuk fleksibilitas, inklusivitas dan keberlanjutan. Tujuannya adalah tidak hanya untuk menghindari *riba* dan *gharar* (ketidakpastian), tetapi juga untuk secara aktif mendorong investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama, Jakarta: Al-Mahira 2011, hlm. 106

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama, Jakarta: Al-Mahira 2011, hlm. 285

⁷ Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru’ Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 1 Mei 2016, hlm. 102

Keuangan islam, dengan prinsip-prinsip syariahnya yang menekankan keadilan, etika dan kebermanfaatannya, memiliki potensi besar untuk menjadi pilar keuangan berkelanjutan. Namun, untuk memaksimalkan perannya, diperlukan pengembangan akad-akad progresif yang mampu menjawab tantangan dan peluang di era modern, sembari tetap berpegang teguh pada nilai-nilai inti islam.

Akad, sebagai pondasi dalam transaksi syariah, memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar sah dan mengikat. Berikut adalah penjelasan untuk setiap poin:

1. Kecakapan (*Ahliyah: Wujub dan Ada'*)

Ini merujuk pada kemampuan hukum seseorang untuk melakukan transaksi. Ada dua aspek kecakapan:

- *Ahliyah Wujub*: Kemampuan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Misalnya, setiap manusia memiliki ahliyah wujub sejak lahir.
- *Ahliyah Ada'*: Kemampuan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban, yang berarti memiliki kemampuan untuk bertindak hukum secara mandiri (misalnya, sudah baligh dan berakal). Seseorang yang tidak cakap, seperti anak kecil atau orang gila, tidak bisa melakukan akad secara sah tanpa perwakilan.

2. Berbilang Pihak (Para Pihak)

Akad selalu melibatkan minimal dua pihak atau lebih. Ini berarti tidak ada akad yang bisa terjadi jika hanya ada satu individu. Contohnya, dalam jual beli, ada penjual dan pembeli; dalam sewa-menyewa, ada pemilik barang dan penyewa.

3. Pertemuan/Kesesuaian *Ijab dan Qabul*

Ijab adalah penawaran atau pernyataan kehendak dari satu pihak, sementara qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lain. Agar akad sah, harus ada kesesuaian mutlak antara ijab dan qabul. Artinya, apa yang ditawarkan harus sama dengan apa yang diterima, tanpa ada perubahan atau syarat tambahan yang mendasar. Jika ada ketidaksesuaian, akad tidak terbentuk.

4. Kesatuan Majelis (Pernyataan Kehendak)

Majlis di sini berarti "tempat" atau "waktu" di mana ijab dan qabul diucapkan. Pentingnya adalah bahwa pernyataan ijab dan qabul harus terjadi dalam satu kesatuan waktu dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kesepakatan. Ini tidak selalu berarti harus di satu ruangan fisik, tetapi bisa juga melalui sarana komunikasi modern asalkan niat untuk bersepakat jelas dan berkelanjutan. Misalnya, dalam transaksi online, kesatuan majlis bisa diartikan sebagai sesi komunikasi yang berlanjut hingga kesepakatan tercapai.

5. Ada atau Dapat Diadakan (Objek Akad)

Objek akad adalah sesuatu yang menjadi pokok perjanjian. Objek ini haruslah nyata dan ada pada saat akad dilakukan, atau setidaknya bisa diwujudkan/disediakan di kemudian hari. Contohnya, Anda tidak bisa menjual barang yang tidak ada dan tidak mungkin diadakan.

6. Tertentu atau Dapat Ditentukan (Objek Akad)

Objek akad harus jelas dan spesifik, atau setidaknya bisa ditentukan karakteristiknya sehingga tidak ada keraguan atau perselisihan di kemudian hari. Jika objek tidak jelas, akad bisa batal karena para pihak tidak tahu persis apa yang mereka sepakati. Misalnya, menjual "salah satu mobil saya" tanpa spesifikasi lebih lanjut tidak sah, kecuali jika kemudian ditentukan mobil yang mana.

7. Dapat Ditransaksikan (*Mutaqawwim wa Mamluk*)

Objek akad haruslah bernilai secara syariat (*mutaqawwim*) dan dimiliki secara sah oleh pihak yang mentransaksikannya (*mamluk*). Barang yang haram atau tidak memiliki nilai di mata syariat (misalnya, minuman keras) tidak bisa menjadi objek akad. Begitu juga, seseorang tidak bisa menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin pemiliknya.

8. Tidak Bertentangan dengan Syara' (*Kausa Akad*)

Kausa akad adalah tujuan atau alasan di balik terjadinya akad. Tujuan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, akad jual beli yang tujuannya untuk mendukung praktik riba atau perjudian adalah tidak sah. Akad harus memiliki tujuan yang halal dan maslahat (bermanfaat) sesuai ajaran Islam.⁸

Ekonomi Islam berkelanjutan menekankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keseimbangan dalam segala aspek kegiatan ekonominya, termasuk dalam akad atau transaksi. Keberlanjutan ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan materi, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang. Dalam mencapai tujuan ini, Islam secara tegas melarang beberapa praktik dalam akad yang dapat merusak keberlanjutan dan keadilan ekonomi. Larangan-larangan ini meliputi : *Pertama*, *riba*, Menurut Al-Jurjani, *riba* adalah kelebihan atau tambahan yang tidak memiliki padanan dalam sebuah transaksi, yang diberikan kepada salah satu pihak yang melakukan akad (perjanjian).⁹ *Kedua*, *gharar*, Menurut Ibnu Hazm, *gharar* adalah suatu kondisi di mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas apa yang ia beli, atau penjual tidak mengetahui dengan jelas apa yang ia jual.¹⁰ *Ketiga*, *Maysir*, *Maysir* artinya sesuatu yang mengandung unsur judi.¹¹ *Keempat*, *Tadlis*, Menurut Ibn Manzhur dalam karyanya *Lisan al-'Arab*, "*dallasa*" dalam konteks jual-beli atau situasi apa pun berarti tidak mengungkapkan adanya kekurangan atau cacat.¹² *Kelima*, *iktikhar*, Adapun *Ihtikar* secara terminologi adalah jika seseorang membeli makanan pada saat harga mahal, kemudian ia menimbunnya untuk dijual dengan harga lebih mahal ketika kebutuhan terhadap makanan tersebut

⁸Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah", *AKTUALITA*, Vol.1 No.1 (Juni 2018), hlm. 126

⁹Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an", *Conomica Volume VII/Edisi 1* (Mei 2016), hlm. 5.

¹⁰Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18 Edisi 2* (Oktober 2017). Hlm. 88

¹¹Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18 Edisi 2* (Oktober 2017). Hlm. 86

¹² Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas", *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 145.

mendesak.¹³ Dengan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam akad ini, ekonomi Islam berkelanjutan berupaya menciptakan sistem yang adil, stabil, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh umat manusia dan alam semesta.

Dalam *muamalah*, gagasan tentang akad-akad progresif memiliki peran krusial dalam mewujudkan ekonomi Islam berkelanjutan. Ini bukan sekadar tentang mematuhi syariah, melainkan tentang mengadaptasi dan mengembangkan instrumen keuangan Islam agar relevan dengan tantangan modern, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Adapun beberapa akad progresif yang bisa diterapkan untuk memajukan keuangan Islam, antara lain :

1. *Akad Tabarru'* adalah jenis perjanjian yang didasari sepenuhnya oleh niat tolong-menolong dan mencari keridaan Allah SWT, tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan materi. Ini murni transaksi nirlaba.¹⁴ Beberapa contoh akad yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- *Hibah*: Pemberian sukarela suatu aset tanpa ada kewajiban timbal balik.
- *Wakaf*: Penahanan harta benda untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau tujuan keagamaan.
- *Wasiat*: Amanat atau pesan yang disampaikan seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia, biasanya terkait pembagian harta atau tindakan tertentu.
- *Ibra'*: Pembebasan atau penghapusan sebagian atau seluruh utang.
- *Wakalah*: Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa.
- *Kafalah*: Penjaminan utang atau kewajiban pihak lain.
- *Hawalah*: Pengalihan piutang atau utang dari satu pihak ke pihak lain.
- *Rahn*: Penyerahan barang jaminan untuk suatu utang.
- *Qirad*: Meskipun sering disamakan dengan mudharabah, dalam konteks tertentu (misalnya, di masa lalu, qirad bisa merujuk pada pinjaman tanpa bunga), akad ini dapat pula dikategorikan sebagai tabarru' jika motifnya murni tolong-menolong dan bukan bagi hasil. Namun, umumnya mudharabah lebih tepat untuk akad bagi hasil yang mencari *return*.

Singkatnya, akad tabarru' mencakup semua bentuk transaksi atau kesepakatan yang bersifat sukarela dan tidak berorientasi keuntungan finansial.

¹³ Fasiha, dkk, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2 (September 2018), hlm. 188.

¹⁴ Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis", *Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016*, hlm. 104

2. *Akad Tijarah*

Dalam fiqih, akad tijarah adalah jenis perjanjian yang tujuan utamanya adalah mencari dan mendapatkan keuntungan, dengan semua rukun dan syarat sahnya akad telah terpenuhi. Ini adalah kontrak yang bersifat kompensasional atau transaksi yang berorientasi laba. Beberapa contoh akad yang termasuk dalam kategori ini meliputi: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna', Musyarakah, Muzara'ah dan Mukhabarah, Musaqah*.¹⁵

Singkatnya, akad tijarah mencakup semua bentuk transaksi atau kesepakatan dalam Islam yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi para pihak yang terlibat.

D. Penutup

Penerapan akad-akad progresif memiliki peran sentral dalam mewujudkan keuangan dan ekonomi Islam berkelanjutan. Inovasi dalam akad syariah ini bukan sekadar adaptasi, melainkan upaya sistematis untuk memastikan setiap transaksi tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengoptimalkan akad seperti mudharabah dan musyarakah untuk proyek-proyek hijau dan sosial, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam akad tijarah dan motif tolong-menolong dalam akad tabarru', kita dapat membangun fondasi ekonomi yang kokoh, stabil, dan berpihak pada kesejahteraan universal. Melalui penekanan pada nilai-nilai keadilan, menghindari praktik terlarang seperti riba dan gharar, serta mengembangkan instrumen yang fleksibel dan inklusif, akad progresif menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberkahi secara spiritual dan ekologis. Ini adalah langkah nyata menuju masa depan ekonomi Islam yang lebih cerah dan berkelanjutan.

¹⁵ Puji Hastuti, Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah, (Skripsi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022). hlm. 30-31

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* Jakarta: Al-Mahira 2011
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007),
- Hastuti, Ely W., Dkk, Keuangan Islan Dan Ekonomi Berkelanjutan, Terbit : Az-Zahra Media Society, 2025.

Jurnal

- Fauzi, Ahmad Sofwan, Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (2017)
- Fasiha, dkk, Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2 (September 2018),
- Ghofur, Abdul, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an, *Conomica Volume Vii/Edisi 1* (Mei 2016),
- Leu, Urbanus Uma, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Tahkim Vol. X No. 1*, (Juni 2014).
- Muchtar, Evan Hamzah, Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar, *Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18 Edisi Oktober 2017*.
- Rafsanjani, Haqiqi, Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis, *Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016*,
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, Dkk, Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah, *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4, No. 12* (Desember 2019),
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah, *Aktualita, Vol.1 No.1* (Juni) 2018,

Skripsi

- Hastuti, Puji, Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah, (Skripsi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022).